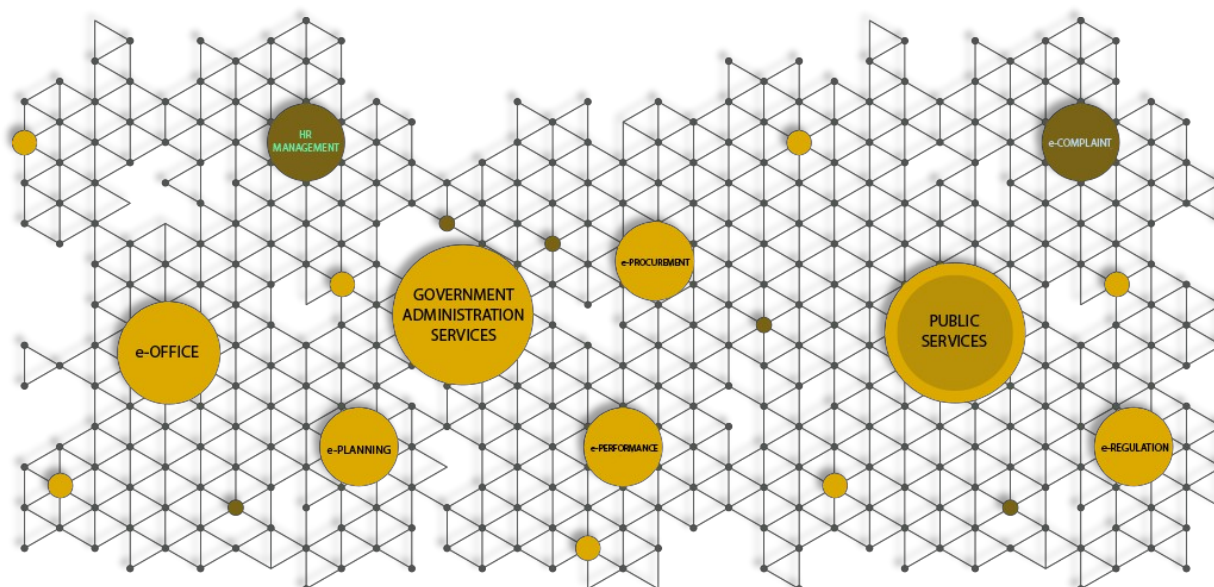




KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



INDEKS SPBE

PEMERINTAH KAB. MADIUN

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2020 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara, dan instansi pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Tim Evaluator Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 20 Januari 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2020

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i>.
2. Terkelola	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
3. Terstandar-disasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.
4. Terintegrasi dan Terukur	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
5. Optimum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

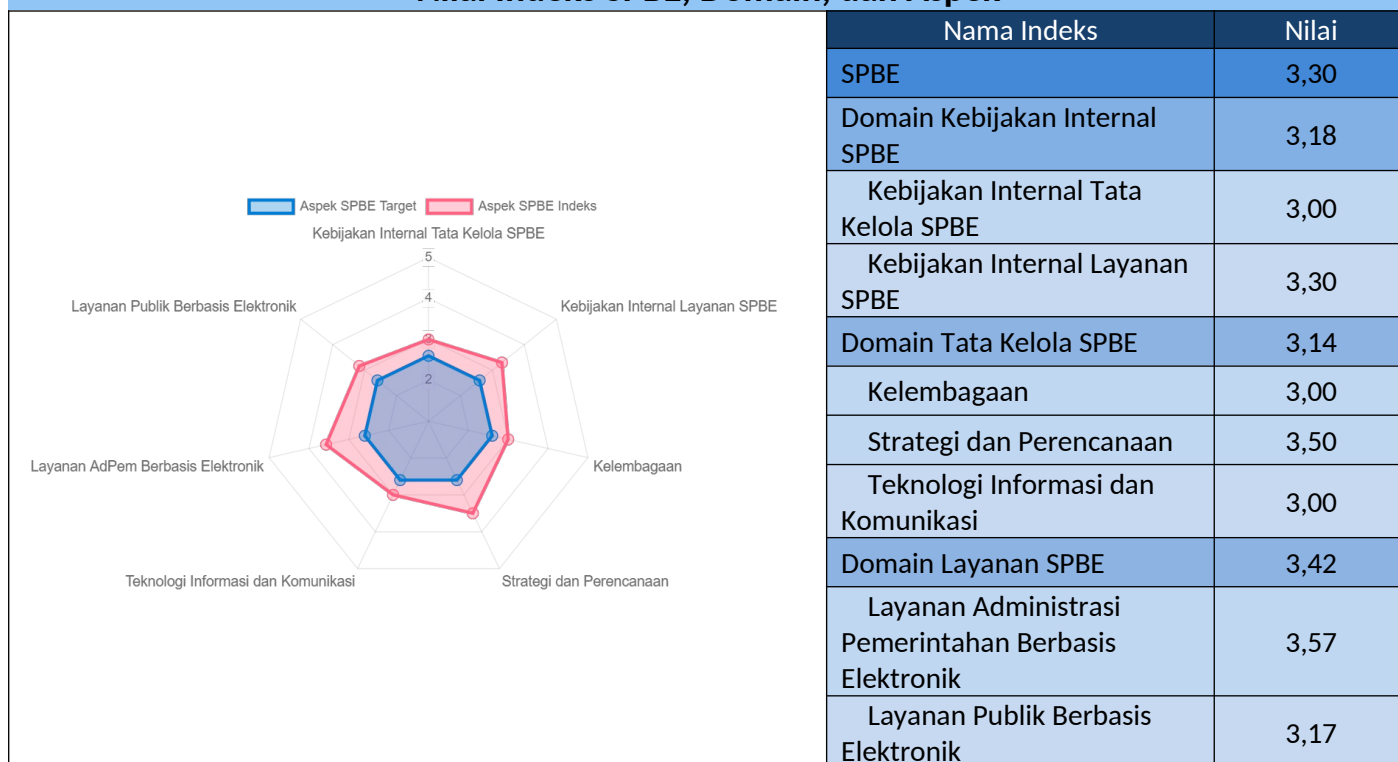
1. Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Interaksi	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	17%
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
Domain 3 - Layanan SPBE	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2.26	3.19	3.14	2.37	2.56	2.04	2.43
Domain Kebijakan	2.07	2.94	2.92	2.14	2.94	1.86	2.18
Kebijakan Tata Kelola	2.01	2.75	2.99	2.15	2.42	1.79	2.18
Kebijakan Layanan	2.11	3.07	2.87	2.13	2.50	1.91	2.18
Domain Tata Kelola	1.95	2.87	2.97	2.32	2.87	1.70	2.08
Kelembagaan	1.88	2.90	2.93	2.28	2.04	1.64	2.02
Strategi & Perencanaan	1.97	2.66	2.98	2.25	2.44	1.74	2.10
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.98	2.99	3.00	2.40	2.29	1.72	2.12
Domain Layanan SPBE	2.48	3.43	3.29	2.47	3.43	2.26	2.69
Administrasi Pemerintahan	2.62	3.52	3.40	2.62	2.82	2.42	2.80
Layanan Publik	2.23	3.28	3.09	2.20	2.58	1.98	2.49

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Kekuatan dan Kelemahan
A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Tata Kelola sudah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dengan adanya Kebijakan Tim internal Pengarah SPBE, Inovasi Proses Bisnis, Penggunaan Aplikasi Umum, Rencana Induk SPBE, Anggaran Belanja SPBE, Operasi Pusat Data, Integrasi sistem aplikasi dan Kebijakan Aplikasi Umum berbagi pakai

- **Kekuatan**

Pada Kabupaten Madiun belum terdapat kekuatan yang signifikan pada Aspek Kebijakan Tata Kelola. Kebijakan Internal Tata Kelola akan menjadi kekuatan kedepannya apabila sudah terdapat arahan untuk koordinasi dengan instansi eksternal lain terkait, misalnya dengan instansi pusat

- **Kelemahan**

Pada Kabupaten Madiun tidak terdapat kelemahan yang signifikan pada Aspek Kebijakan Tata Kelola

B. Kebijakan Internal Layanan SPBE

Secara umum penerapan pada Aspek Kebijakan Layanan SPBE sudah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun adalah berupa telah adanya Kebijakan internal terkait layanan SPBE meliputi kebijakan internal layanan perencanaan dan penganggaran, keuangan, manajemen kinerja, naskah dinas, JDIH, pengaduan publik dan WBS (Whistle Blowing System)

- **Kekuatan**

Pada Aspek Kebijakan Layanan SPBE yang menjadi kekuatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun adalah kebijakan internal manajemen kepegawaian, dan manajemen pengadaan. Kebijakan internal layanan sudah mendukung kebutuhan integrasi sistem dengan sistem / aplikasi lain baik internal maupun eksternal instansi yang ditunjukkan pada perbup SPBE no 81 Tahun 2019, Perbup SIMPEG no 5 Tahun 2019 dan Perbup No 8 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik

- **Kelemahan**

Pada Kabupaten Madiun tidak terdapat kelemahan yang signifikan pada Aspek Kebijakan Layanan SPBE

C. Kelembagaan

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kelembagaan sudah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dengan adanya Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah yang sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya dan Inovasi proses bisnis terintegrasi yang sudah dijalankan, terstandarkan, diterapkan pada seluruh unit kerja

- Kekuatan

Pada Kabupaten Madiun tidak terdapat kekuatan yang signifikan pada Aspek Kelembagaan. Kekuatan pada Aspek Kelembagaan dapat diperoleh apabila tugas dan fungsi Tim pengarah SPBE serta penerapan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik dan dapat dipantau serta dievaluasi secara berkala

- Kelemahan

Pada Kabupaten Madiun tidak terdapat kekurangan yang signifikan pada Aspek Kelembagaan.

D. Strategi dan Perencanaan

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Strategi dan Perencanaan sudah dipenuhi oleh Kabupaten Madiun dengan adanya Rencana Induk SPBE dan pengelolaan anggaran belanja SPBE yang tertuang dalam rencana kerja tahunan; seluruh perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Strategi dan Perencanaan yang menjadi kekuatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun adalah berupa rencana induk SPBE yang sudah diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja 3 (tiga) tahun terakhir dan dipantau serta dievaluasi secara berkala.

- Kelemahan

Pada Kabupaten Madiun tidak ditemukan kelemahan yang signifikan pada Aspek Strategi dan Perencanaan

E. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara umum penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun adalah berupa sudah dilakukannya pengelolaan pusat data, integrasi sistem aplikasi dan pengelolaan aplikasi umum berbagi pakai pada instansi.

- Kekuatan

Pada Kabupaten Madiun tidak ditemukan kekuatan yang signifikan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kekuatan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dicapai apabila pelaksanaan monitoring dan perencanaan kapasitas pusat data sudah dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaman aktivitas pusat data, integrasi sistem aplikasi dan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.

- Kelemahan

Pada Kabupaten Madiun tidak ditemukan kelemahan yang signifikan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

F. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara umum penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun adalah berupa implementasi aplikasi pendukung layanan naskah dinas, manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi kekuatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun adalah sudah terimplementasinya aplikasi pendukung layanan manajemen perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan yang sudah terintegrasi. Layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan sudah terintegrasi pada aplikasi "SIMDA INTEGRASI"

- Kelemahan

Pada Kabupaten Madiun tidak ditemukan kelemahan yang signifikan pada Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

G. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun adalah dengan adanya implementasi aplikasi pendukung layanan pengaduan publik, layanan WBS (Whistle Blowing System) serta layanan publik spesifik yaitu SIM RS dan IMP Smart

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Layanan SPBE yang menjadi kekuatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun adalah dengan implementasi layanan publik berupa layanan pengaduan publik dengan menggunakan SP4N LAPOR, dan layanan publik spesifik berupa E-Link yang sudah terintegrasi

- Kelemahan

Untuk kelemahan adalah pada layanan JDIH, walaupun layanan JDIH sudah terintegrasi dengan JDIHN, namun demikian secara proses bisnis masih dianggap bersifat diseminasi, belum memenuhi unsur layanan transaksi.

Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Kabupaten Madiun. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Madiun, sudah dapat memperlihatkan predikat BAIK. Untuk keseluruhan domain yang meliputi kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE dan Layanan SPBE, Kabupaten Madiun sudah mendapatkan predikat BAIK. Dari gambaran pelaksanaan SPBE internal di Kabupaten Madiun, banyak aspek-aspek SPBE yang telah diterapkan sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Madiun adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE, Aspek Strategi dan Perencanaan SPBE, dan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Kebijakan layanan SPBE yang sudah mengamanatkan untuk pelaksanaan integrasi layanan baik internal Instansi maupun lintas instansi. Keunggulan aspek strategi dan perencanaan terlihat dengan adanya dokumen Rencana Induk SPBE dengan muatan yang lengkap, mencakup visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan arsitektur keamanan), dan peta jalan SPBE yang sudah diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja 3 (tiga) tahun terakhir, dipantau serta dievaluasi secara berkala, serta adanya pengelolaan anggaran dan belanja SPBE yang tertuang dalam rencana kerja tahunan yang telah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK, serta dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan terlihat adanya aplikasi-aplikasi yang sudah menyediakan fungsi transaksi dan telah dilakukannya pengintegrasian pada aplikasi umum berbagi pakai pada bidang kepegawaian, perencanaan/penganggaran, keuangan dengan aplikasi SIMDA TERINTEGRASI dan aplikasi pengadaan dengan menggunakan SPSE dari LKPP sehingga secara administrasi dapat terinventarisir rapi dan lengkap. Seluruh Keunggulan saling terkait dan membuat pelaksanaan system pemerintahan di internal Kabupaten Madiun menjadi efektif dan efisien baik dari anggaran maupun kinerja yang optimal. Pada Kabupaten Madiun sudah tidak ditemukan kelemahan yang signifikan pada aspek-aspek terkait evaluasi SPBE, seluruh aspek yang dievaluasi pada masing-masing domain sudah masuk dalam kategori baik dan sangat baik. Walaupun secara umum untuk seluruh aspek sudah masuk dalam kategori baik dan sangat baik, masih terdapat peluang perbaikan yang dapat dilakukan kedepan. Pada Aspek kebijakan tata kelola SPBE masih dapat ditingkatkan lagi misalnya dengan adanya arahan kolaborasi dengan instansi lain. Pada Aspek kelembagaan perlu pelaksanaan evaluasi secara berkala untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Pengarah SPBE dan pelaksanaan inovasi proses bisnis terintegrasi, begitu juga pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dapat dilakukan perbaikan disisi pengelolaan pusat data, integrasi sistem dan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dengan melakukan evaluasi secara berkala untuk pelaksanaan perbaikan yang berkesinambungan. Selain itu, untuk kedepannya Kabupaten Madiun diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Domain Manajemen SPBE yang terdiri dari penerapan manajemen dan audit TIK serta aspek penerapan SPBE lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian yang diminta.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	3
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	3
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	3
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	3
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	3
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	3
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	3
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	3
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	4
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	3
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	3
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	3
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	4
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	3
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	3
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	4
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	3
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	3
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	4
21	Anggaran dan Belanja TIK	3
22	Pengoperasian Pusat Data	3
23	Integrasi Sistem Aplikasi	3
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	3
25	Layanan Naskah Dinas	3
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	3
27	Layanan Manajemen Perencanaan	4
28	Layanan Manajemen Penganggaran	4
29	Layanan Manajemen Keuangan	4
30	Layanan Manajemen Kinerja	3
31	Layanan Pengadaan	4
32	Layanan Pengaduan Publik	4
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2
34	Layanan Whistle-Blowing System	3
35	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1	3
36	Layanan Publik Instansi Pemerintah 2	4
37	Layanan Publik Instansi Pemerintah 3	3